

EDISI JUNI - JULI 2024



MEDIA_{voL.16} JUSTITIA

One Stop Legal Information

INTERVIEW EKSKLUSIF

**FROM AIRCRAFT
ENGINEER TO
DIRECTOR: VISI
ENNY KRISTIANI
MEMBANGUN
EMPLOYEE &
CUSTOMER
EXPERIENCE DI
GARUDA INDONESIA**

TOKOH HUKUM

**DR. ARTIDJO
ALKOSTAR, S.H., LL.M.**

ALGOJO PARA KORUPTOR

BERITA DAN LIPUTAN

**KOLABORASI PERADI DAN IJRS: PELATIHAN
UNDANG-UNDANG KEKERASAN SEKSUAL
UNTUK ADVOKAT**

SCAN ME



DOWNLOAD MAJALAH
MEDIA JUSTITIA DIGITAL



SEKAPUR SIRIH



Salam sejahtera bagi kita semua, Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai "One Stop Legal Information" merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelumnya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui Media-Justitia.com dan juga channel Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaian informasi melalui audio visual dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), Ini Podcast, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai media partner bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan social media seperti website, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut di antaranya adalah Kantor Hukum (Law Firm), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan social media, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatan-kegiatan dalam bentuk audio visual sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui serangkaian proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi One Stop Legal Information bagi para pembacanya.

Salam,
Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med.
 Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

Content

**INTERVIEW EKSKLUSIF
 FROM AIRCRAFT ENGINEER TO DIRECTOR:
 VISI ENNY KRISTIANI DALAM MEMBANGUN
 EMPLOYEE & CUSTOMER EXPERIENCE
 DI GARUDA INDONESIA** 04



BERITA DAN LIPUTAN

Rapat Anggota Perdana, Asosiasi Mediator Duta Damai Sahkan Kode Etik	06
Ujian Profesi Advokat: Otto Hasibuan Rangkul 3.065 Calon Advokat di 41 Kota Indonesia	08
AKPI Soroti Skema Restrukturisasi Utang di Luar Pengadilan	24
Keberhasilan Akreditasi Unggul Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur: Bukti Dedikasi dan Profesionalisme	26
Penguahan Guru Besar Dr. Firmanto Laksana: Menyelaraskan Pendidikan dengan Pengembangan Hukum di Indonesia	27
Kolaborasi Justitia Training Center dan IPRI Law Institute: Meningkatkan Mutu Pendidikan Hukum di Indonesia	28
Kolaborasi PERADI dan URS: Pelatihan Undang-Undang Kekerasan Seksual untuk Advokat	30

TOKOH HUKUM

**DR. ARTIDJO
 ALKOSTAR, S.H., L.H.M.**

ALGOJO PARA KORUPTOR

ADAGIUM HUKUM	23
EDUKASI HUKUM	09
PRODUCTION TEAM	34

BERITA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Mengupas Tuntas Hukum Perusahaan dan Ketenagakerjaan, Justitia dan PPPHI Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Online	10
Justitia Lahirkan Lebih dari 2000 Mediator Non-Hakim Sejak 2018	11
Demi Mencetak Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Profesional, Justitia Bersama PAHKI Gelar Pelatihan dan Sertifikasi	12
Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi: Menggali Lebih Dalam Aspek Hukum Perlindungan Risiko	13
Justitia Training Center Berkolaborasi dengan Hukumonline bersama PERKHAPPI Cetak Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Profesional	14
DPP AAI Gandeng Justitia untuk In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Mediator	15
Atasi Kompleksitas Permasalahan Kontrak Konstruksi, PT PGAS Solution gandeng Justitia Training Center Gelar Pelatihan Ahli Kontrak Kerja Konstruksi	16
Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia, PTPN Gandeng Justitia Training Center Gelar Pelatihan dan Sertifikasi	18
Prof. Drs. Anwar Sanusi: Pentingnya Pendidikan Hukum Perusahaan dalam Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXIV yang diselenggarakan oleh Justitia Training Center dan PPPHI	20

CALL FOR ARTICLE BATCH XXII 35

Interview Eksklusif

FROM AIRCRAFT ENGINEER TO DIRECTOR: VISI ENNY KRISTIANI DALAM MEMBANGUN EMPLOYEE & CUSTOMER EXPERIENCE DI GARUDA INDONESIA

MediaJustitia.com: Pada bulan Mei silam, PT Garuda Indonesia (Persero) mengadakan Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan menyetujui perubahan komisaris dan direksi.

Enny Kristiani, Direktur Human Capital dan Corporate Service yang baru, memulai karirnya di Garuda Indonesia sebagai *Aircraft Engineer* selama 10 (sepuluh) tahun. Setelahnya berbagai penugasan diemban Enny antara lain di Direktorat Operasi mengelola *Aircraft Lease Management* dan melanjutkan titian karirnya di bidang keuangan mengelola *Asset Management, Fleet Management, Enterprise Risk Management* serta mengelola subsidiary Perusahaan. Amanah sebagai *Board of Director Subsidiary Garuda Indonesia* dimulai sebagai Direktur Keuangan dan Personalia di PT Garuda Indonesia Air Charter (cucu perusahaan PT Garuda Indonesia) sebelum menjadi Direktur Utama PT Sabre Travel Network Indonesia (anak perusahaan PT Garuda Indonesia).

Enny mempunyai background sarjana Teknik Kimia dari UGM

Yogyakarta, pasca sarjana dari Stanford Uni-

versity, Palo Alto USA dalam bidang Material Science & Engineering, dan doktor management business dari IPB University. Dalam bidang hukum, Enny menyelesaikan Diploma of Air Law dari IATA, Geneva.

Tempo hari lalu, Media Justitia berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Direktur Human Capital dan Corporate Service PT Garuda Indonesia (Persero). Apa saja gebrakan yang akan dilakukan dan ke mana arah fokus kepemimpinan Enny Kristiani? Berikut adalah petikan bincang-bincang antara tim Media Justitia dan Enny Kristiani.

Dengan latar belakang Pendidikan dan kaya pengalaman kerja diberbagai bidang aviation industry, menjadi bekal utama Enny dalam mengemban Amanah sebagai Direktur Human Capital dan Corporate Service PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Bagaimana visi dan gambaran Ibu dalam mengemban tanggung jawab sebagai Direktur Human Capital & Corporate Services?

People merupakan aset komponen penting dalam pencapaian visi dan target perusahaan.

Karena itu kami menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yg kondusif terhadap pergerakan organisasi dan peningkatan *engagement* karyawan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung, antara lain menyiapkan *Learning Organization* yakni dengan menciptakan lingkungan yang bertransformasi sehingga siap untuk perubahan-perubahan internal maupun eksternal termasuk *global trend*, serta kebijakan *Knowledge Management*.

Program-program peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan peningkatan *engagement* karyawan akan jadi fokus kami seperti *talent management, leadership development, employee development, reward* yg kompetitif, kejelasan karir, dan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan *employee experience*.

Garuda Indonesia telah meraih berbagai penghargaan. Sebagai pilar suksesi, bagaimana Bu Enny akan mempertahankan kualitas dan juga mengembangkan sumber daya manusia di Garuda, khususnya dalam menunjang "Garuda Indonesia Experience"?

Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan terus *customer experience* untuk mendukung Sustainability Perusahaan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan customer Garuda merasakan sentuhan pelayanan yang terbaik. Untuk dapat memberikan *experience* yang berbeda, unik dan kaya dengan *competitive advantage*, kami terus mengedepankan dan meningkatkan *employee*

experience dengan meningkatkan motivasi, semangat sumber daya manusia yang berani dan proaktif serta beretika dengan berlandaskan pada nilai-nilai perusahaan.

Bagaimana Bu Enny akan membangun dan memperkuat budaya perusahaan yang positif dan mendukung "Garuda Indonesia Experience"?

Kami telah memiliki culture yg kami sebut dg the Garuda Way yg terus menerus disosialisasikan, terdiri atas 3 pilar yaitu *"I'm With You, Because You Matter, I'm In Charge"*. Dalam mengupayakan internalisasi kultur, semangat inovasi dan mendorong perubahan yang terjadi, kami terus mempertajam program-program seperti kompetisi dan reward. Sebagai contoh penerapan budaya di lingkungan masing-masing adalah dengan kegiatan *sharing session* rutin per unit kerja *meeting for great, team building* dan juga *culture festival* yang mulai kami lakukan. Selain itu, Budaya Inovasi juga menjadi prioritas kami

Dalam proses transformasi tentunya akan ada perbedaan pendapat yang akan mewarnai dinamika-dinamika di organisasi. Namun hal tersebut adalah salah satu langkah penting dalam menjembatani munculnya ide-ide baru yang *breakthrough* dalam menciptakan keberhasilan.

Bagaimana Bu Enny menghadapi tantangan-tantangan dalam bentuk permasalahan di bidang industrial?

Kuncinya adalah komunikasi, transparansi dan saling menghormati. Kami akan dialog dengan berbagai pihak yang terkait, dan memberikan ruang untuk saling

memahami tujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan. Apabila kinerja Perusahaan terpenuhi tentunya tidak hanya Perusahaan yang akan menikmati namun karyawan juga akan mendapatkan reward dan manfaatnya.

Bagaimana Bu Enny mengukur keberhasilan program pengembangan SDM?

Tolak ukur utamanya adalah seberapa semangat, motivasi dan produktif karyawan untuk bekerja. Hal tersebut dapat dilihat melalui produktivitas karyawan seperti *revenue per employee* dan juga hasil survey *employee engagement*. Karyawan yang engage akan menjadi representasi Perusahaan ke pihak eksternal. Selain itu, kami harus meyakinkan kapabilitas karyawan melalui kompetensi *rating, ketersediaan talent, dll*.

Sebagai penutup, Bu Enny berpesan kepada SDM di Garuda Airlines bahwa Garuda Indonesia tidak hanya profit oriented company, melainkan suatu perusahaan kebanggaan rakyat Indonesia.

"Mari bersama kita majukan perusahaan ini dengan tanpa lelah memberikan yang terbaik yang kita mampu karena kerja terbaik yang diberikan karyawan tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan pencapaian target perusahaan, melainkan juga kembali kepada karyawan dalam bentuk kepuasan kerja dan rejeki yang lebih baik," imbuhnya.

Rapat Anggota Perdana, Asosiasi Mediator Duta Damai Sahkan Kode Etik!

Mediajustitia.com: Jumat (14/06/24), Asosiasi Mediator Duta Damai (AMDD) menggelar Rapat Anggota pertama.

Sebagai informasi, AMDD berasal dari keprihatinan akan banyaknya mediator bersertifikat yang belum diberdayakan. Saat ini, AMDD mewadahi sekitar 60 mediator bersertifikat dan telah menjadi penggagas program mediator non hakim di berbagai Pengadilan Negeri Jakarta dan sekitarnya.

“Sebagaimana nama Asosiasi kita, sebenarnya sudah terlihat bahwasanya yang dibutuhkan adalah “damai”. Tentu kita sudah sama-sama tau apa saja fungsi dan tugas sebagai mediator. Dengan adanya mediator, kita diharapkan dapat membantu tugas pengadilan dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi. Terkadang kami merasa miris dengan kondisi akhir-akhir ini dimana adanya mediator yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai penengah,” ujar Titi Nurmala Siagian, S.H., M.H., purna bakti Hakim Agung RI (Pengawas AMDD).

Lebih lanjut Titi Nurmala Siagian menegaskan agar mediator tidak terhanyur oleh emosi yang membuat kalut dan senantiasa menjaga integritas.

“Hari ini sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar, akan ada rapat anggota dengan beberapa agenda yang kami bahas, yakni perubahan Anggaran Dasar, pembentukan Anggaran Rumah Tangga, pengesahan Kode Etik & Pedoman Perilaku Mediator, serta pembentukan Majelis Kehormatan Etik,” ujar Dr. Lenny Nadriana, S.H., M.H., C.Med (Sekertaris AMDD) dalam wawancara terpisah bersama tim Media Justitia.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., C.Med menyampaikan bahwasanya puncak kegiatan yang ditunggu-tunggu adalah pengesahan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Mediator. Sebelumnya, Kode Etik telah disusun dan dibahas bersama selama lebih dari satu bulan dengan diketuai oleh Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med.

“Kami telah membentuk tim penyusun dan sudah disusun selama hampir lebih dari satu bulan. Kode etik ini menjadi penting karena inilah “roh” nya. Dengan adanya kode etik, kami memiliki tolak ukur untuk memberi teguran dan menasihati anggota-anggota. Hari ini kami akan bahas secara terbuka dengan seluruh anggota agar bisa difinalisasi dan disahkan,” jelas Dr. Dra. Risma.



Adapun Rapat Pleno diawali dengan Laporan Ketua Panitia Rapat Anggota AMDD Tahun 2024 oleh Marla R. Wongkar, S.H., M.H. C.Med.; Laporan Kegiatan AMDD sejak Tahun 2021 – 2024 oleh Dr. Lenny Nadriana, S.H., M.H., C.Med. (Sekretaris AMDD); Laporan Keuangan AMDD sejak Tahun 2021 – 2024 oleh Marla R. Wongkar, S.H., M.H. C.Med. (Bendahara AMDD); dan Pemaparan Program Rencana Kegiatan AMDD Tahun 2024 -2026 oleh Dr. (c) Susy Tan, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua AMDD. Bertempat di Lt. 2 Gedung Graha Kana, Jakarta Pusat, Rapat Anggota berlangsung dengan lancar dan kondusif. Para peserta aktif memberikan masukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah.

Sesuai agenda yang direncanakan, pada penghujung Rapat Anggota, AMDD mengesahkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku serta membentuk Majelis Kehormatan Etik.

Dr. Dra. Risma berharap, profesi mediator akan semakin dikenal di luar pengadilan. Kedepannya, tidak hanya dengan Pengadilan, AMDD akan aktif mengadakan kerja sama dan bersinergi untuk membantu penyelesaian perkara secara mediasi.

“Harapan saya, kami semua satu visi, satu tujuan, yakni menjadikan AMDD sebagai organisasi mediator yang handal, profesional, dan berintegritas,” imbuhnya.

Ujian Profesi Advokat: Otto Hasibuan Rangkul 3.065 Calon Advokat di 41 Kota Indonesia



Mediajustitia.com: Sebanyak 3.065 individu yang berpotensi menjadi advokat mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) secara serentak di 41 kota di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, pada tanggal 29 Juni.

Prof. Otto Hasibuan, Ketua Umum Peradi, menyatakan bahwa pelaksanaan UPA ini melibatkan banyak kota di Indonesia, seperti Papua, Medan, dan Aceh. Jakarta menjadi pusat dengan jumlah peserta hampir mencapai 1.000 orang, yang merupakan sekitar 35% dari total peserta. Ujian ini diadakan dua kali dalam setahun dengan rata-rata partisipasi 6.000 hingga 7.000 peserta.

Tujuan dari penyelenggaraan UPA di berbagai kota adalah untuk memfasilitasi calon advokat Peradi agar dapat mengikuti ujian tanpa harus datang ke Jakarta, yang dapat menghemat biaya dan waktu mereka. Prof. Otto menegaskan bahwa UPA dijalankan dengan prinsip zero Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) untuk menjaga kua-

litas advokat yang ada dan menciptakan advokat yang profesional dan berintegritas.

Menurut Prof. Otto, Peradi hanya berperan sebagai pengamat dalam UPA ini dan bukan sebagai pengawas langsung terhadap peserta ujian. Dia menambahkan bahwa seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi telah aktif dalam memberikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta tryout untuk mempersiapkan calon advokat menghadapi standar yang tinggi dalam UPA. Prof. Otto juga menyoroti pentingnya kode etik dalam pendidikan dan ujian ini, karena bagi Peradi, memiliki perilaku yang baik dan integritas tinggi merupakan hal yang sangat penting bagi seorang advokat.

Terakhir, dalam konteks perkembangan hukum terkait Peninjauan Kembali (PK) kasus terpidana pembunuhan Vina dan Eky, Prof. Otto menyatakan bahwa Peradi akan terus memperjuangkan keadilan bagi keduanya, dengan tetap memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan proporsional.

GAGAL BAYAR PINJOL, APA ASPEK HUKUMNYA?

MediaJustitia.com: Galbay merupakan singkatan dari gagal bayar yaitu keadaan di mana seseorang (debitur) tidak dapat melunasi cicilan pinjamannya dari perusahaan penyedia pinjaman online.

Dalam praktiknya, pinjaman online yang mudah diakses melalui smartphone menjadi pilihan setiap orang dengan kelebihan-nya dari segi efisiensi waktu, memiliki bunga rendah, mendapatkan promosi, dan lainnya membuat orang tergeda untuk meminjam uang tanpa memikirkan dampak di kedepannya, yang berujung pada gagal dibayarnya dana pinjaman tersebut.

Akibat gagal bayar pinjaman online, penerima dana/peminjam memiliki beberapa resiko seperti tagihan menjadi lebih besar. Tentunya hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK bahwa bunga pinjol legal ialah sebesar 0,4% per hari termasuk biaya-biaya untuk pinjaman multiguna/konsumtif dengan tenor pendek misalnya kurang dari 30 hari, sedangkan untuk pinjaman produktif bunga sekitar 12% - 24%.

Selain itu, penagihan yang dilakukan oleh debt collector baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK, dan bukan afiliasi penyelenggara pinjol.

Resiko lainnya juga, peminjam akan tercatat sebagai debitur kualitas buruk di SLIK OJK. Gagal bayar pinjol akan tercatat di SLIK OJK dengan kualitas kurang baik, maka hal tersebut menjadi pertimbangan LJK lain atau bank untuk memberikan pinjaman, proyek, seleksi pegawai, atau keperluan lainnya.

Apabila ditinjau dari segi hukum tindakan debitur yang gagal membayar pinjaman online ialah WANPRESTASI.

an pinjaman online berhak melakukan penagihan kepada penerima dana/peminjam dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Jadi, sobat justitia juga harus hati-hati dalam mengelola keuangan terutama terkait penggunaan pinjaman online ya! Jangan sampe kasus serupa terulang lagi.

Simak Edukasi Hukum lainnya hanya di www.mediajustitia.com.



WANPRESTASI

Pinjaman online masuk dalam ranah utang piutang. Utang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, bahwa Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

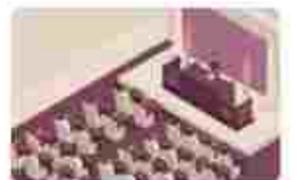
Penagihan yang dilakukan oleh debt collector dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 103 ayat (1) dan (3) POJK 10/2022 menjelaskan Penyelenggara pinjol dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menagih utang dengan syarat pihak lain tersebut sudah tersertifikasi dari lembaga



Memahami Tahapan dan Syarat-Syarat Menjadi Jaksa



Perbedaan Peran DPR dan DPD dalam Mewakili Suara Rakyat



Peran Hak Angket dalam Sistem Demokrasi

Mengupas Tuntas Hukum Perusahaan dan Ketenagakerjaan, Justitia dan PPPHI Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Online

MediaJustitia.com: Berbicara mengenai hubungan industrial, tidak serta merta membicarakan hubungan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah sebagai para pelaku hubungan industrial, melainkan membicarakan kondisi ketenagakerjaan secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi bidang lainnya, seperti ekonomi, politik, dan sosial.

Agatha Widyanawati, S.H., M.H. selaku Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXIII yang diselenggarakan oleh Justitia Training Center bekerja sama dengan Perkumpulan Profesi Praktisi Hubungan Industrial (PPPHI) menyampaikan bahwa terdapat elemen masyarakat selain daripada pelaku hubungan industrial, yakni peran praktisi dan akademisi, yang tidak kalah penting untuk mendukung tujuan hubungan industrial.

"Kami memahami dan tahu persis, para praktisi dan akademisi di sini mempunyai andil untuk terus mendedikasikan, mengadvokasi, dan memahami kebenaran terkait dengan hubungan industrial bagi pemerintah. Eksistensi praktisi yang memiliki pengetahuan yang cukup akan sangat membantu dalam menjaga kondisi hubungan industrial agar tetap harmonis, dinamis, dan produktif," ujarnya dalam **Keynote Speech** pada Kamis (30/05/24).

Pada kesempatan tersebut, Agatha menuturkan bahwasanya terdapat 8 (delapan) sarana hubungan industrial, yakni serikat pekerja buruh; organisasi pengusaha; lembaga Kerjasama bipartit; lembaga kerjasama tripartit; Peraturan Perusahaan (PP); Perjanjian Kerja Bersama (PKB); peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan; dan lembaga penyelesaian hubungan industrial.

Kedelapan sarana tersebut menjadi penting dan pokok ketika melakukan dan mewujudkan tujuan hubungan industrial, yakni menjaga kondisi hubungan industrial agar tetap harmonis, dinamis, dan produktif.

"Pejalanan Undang-Undang Cipta Kerja merubah banyak konsepsi tentang hubungan industrial, ada juga perubahan yang bersifat menguatkan hubungan industrial yang sudah berjalan sebe-



lumnya, sebagai contoh adanya ketentuan mengenai kompensasi, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan juga batas-batas pelaksanaan/penerapan PKWT," jelas Agatha.

Lebih lanjut Agatha mengingatkan dalam upaya melaksanakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, praktisi perlu mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial.

Sebagai penutup, turut disampaikan beberapa isu untuk menjadi perhatian. Pertama, transformasi bisnis yang dapat berpotensi pada munculnya permasalahan ketenagakerjaan; Kedua, dualism kepengurusan serikat pekerja dan buruh yang cukup mempengaruhi kondisi industrial; Ketiga, transformasi energi nasional di bidang ekonomi-sosial ketenagakerjaan yang akan berimbas pada transisi, pen-

cegahan PHK dan penyediaan alternatif lapangan pekerjaan; Keempat, tren PHK yang cenderung meningkat; dan Kelima, tren perselisihan hak, kepentingan, PHK dan antar serikat pekerja/buruh dengan perusahaannya.

"Terima kasih dan tentunya penghargaan kepada penyelenggara atas kegiatan ini. Kegiatan edukasi dalam bentuk pelatihan seperti ini sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya yang mempunyai atensi terhadap perubahan hubungan industrial di Indonesia. Kegiatan yang disertai sertifikasi ini akan membuktikan bahwa peserta memiliki pengetahuan, keahlian serta kompetensi tentang hubungan industrial. Kami mengapresiasi Justitia Training Center dan kami harap sedikit banyak bisa membawa kemajuan bagi hubungan industrial," pungkasnya.

Justitia Lahirkan Lebih dari 2000 Mediator Non-Hakim Sejak 2018

Mediajustitia.com: Justitia Training Center bersama Badan Mediasi Nasional Indonesia (BaMNI) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XLVI. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 29 Mei 2024 hingga 02 Juni 2024.

Pelatihan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Jumlah peserta Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XLVI diikuti sebanyak 28 orang, yang berasal dari berbagai instansi maupun individu.

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med. selaku Presiden Direktur Justitia Training Center menjelaskan bahwa Justitia sudah melahirkan lebih dari 2000 Mediator Non-hakim yang kompeten sejak 2018 hingga saat ini.

"Justitia Training Center sudah berfokus di bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sejak tahun 2018 yang mana hal tersebut dapat dibuktikan melalui terjalannya kerjasama dengan sejumlah lembaga baik secara nasional dan juga internasional di bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan sampai saat ini setelah angkatan ke 46 ini Justitia sudah melahirkan lebih dari 2000 mediator non-hakim yang kompeten," ungkapnya.

Andriansyah juga menambahkan bahwa peserta akan mendapatkan pembekalan materi oleh ahli dan juga praktisi yang sudah tersertifikasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia?



"Bapak ibu jangan khawatir karena nanti Bapak Ibu akan dibimbing, dilatih dan diberikan pembekalan materi oleh ahli dan juga praktisi di bidangnya masing-masing dan juga akan didampingi oleh para coach yang sudah tersertifikasi mediator Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan dengan bangga saya sampaikan bahwa saat ini Justitia Training Center merupakan satu-satunya LSP di Indonesia yang sudah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," tambahnya.

Beberapa narasumber yang turut hadir dalam pelatihan ini meliputi Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.; Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H.; Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med.; Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., CCD., C.Med.; Hyang I. Miharja, S.H., M.B.A.; dan Ismu Bahaiduri, S.H., M.H.;

Adapun garis besar materi yang diberikan dalam pelatihan antara lain:

1. Orientasi Pelatihan Sertifikasi Mediator
2. Dasar-dasar Mediasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016
3. Administrasi Mediasi di Pengadilan
4. Presentasi diri Mediator
5. Merancang & Merencanakan Proses Mediasi
6. Mediasi Penal & Restorative Justice
7. Tahapan Mediasi
8. Mengidentifikasi Masalah & Menyusun Agenda
9. Memfasilitasi Para Pihak
10. Teknik Reframing dalam Mediasi
11. Mengungkap Kepentingan Tersembunyi & Kaukus
12. Keahlian Negosiasi dalam Proses Mediasi
13. Mengakhiri Proses Mediasi dengan Efektif & Efisien
14. Membuat Nota Kesepakatan
15. Kode Etik Mediator & Pedoman Perilaku Mediator
16. Simulasi Proses Mediasi
17. Pemutaran Film Mediasi

Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Mediator selanjutnya bisa menghubungi
0811 1282 112 (Rafly)
0811 8891 492 (Tami)

Pada akhir kegiatan, para peserta akan menghadapi ujian kompetensi dan diberikan kesempatan untuk mengikuti uji sertifikasi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia.

Salah satu peserta Dedy Bernandus Simanjuntak S.E., B.A., S.H., M.H., CCD., CCCS., CMLC. saat diwawancarai oleh tim Media Justitia menjelaskan alasan mengapa ia memilih Pelatihan dan Sertifikasi di Justitia Training Center.

"Justitia Training Center mengkomitmenkan dirinya sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Jadi Justitia Training Center adalah tempat bagi profesional hukum untuk mengembangkan kemampuan dan skill bidang hukum, jadi Justitia adalah tempat paling tepat," jelasnya.

Selain Dedy tim Media Justitia juga mewawancarai Sari Debora Gracia Saragih, S.H. yang berasal dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), ia merasa sangat puas selama kegiatan berlangsung karena dibekali materi dari para pemateri profesional dan berpengalaman.

Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial selanjutnya, hubungi

0811 9942 112 (Harfi)
0811 1254 0305 (Rahmah)

Demi Mencetak Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Profesional, Justitia Bersama PAHKI Gelar Pelatihan dan Sertifikasi



MediaJustitia.com: Justitia Training Center dan Perkumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI) telah menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan XVII pada 5 – 8 Juni 2024.

Pelatihan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Jumlah peserta Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XLVI sebanyak 28 orang, yang berasal dari berbagai instansi maupun individu.

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CGD, CTLC, CMLC, C.Med. selaku Presiden Direktur Justitia Training Center membuka pelatihan dengan menyampaikan bahwa klausul dalam kontrak dapat memberikan pengaruh yang sangat besar di kemudian hari dalam pengerjaan pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

“Klausul dalam kontrak dapat memberikan pengaruh yang sangat besar di kemudian hari dalam pengerjaan pengadaan barang dan jasa dan Perlu kita pahami juga bahwa dalam tahap penyusunan kontrak sangat penting karena kata-kata yang digunakan bisa multitafsir,” jelasnya.

Andriansyah juga menambahkan bahwa pada pelatihan ini akan dijelaskan mengenai apa saja hal baru dan perubahan perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pada pelatihan ini akan dijelaskan mengenai hal-hal terbaru dan perubahan-perubahan apa saja terkait peraturan pengadaan barang dan jasa lalu akan berfokus

juga pada posisi dan peran penting perancang dan ahli manajemen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam memahami dan menguasai keterampilan pendampingan hukum dalam hal penyusunan kontrak pengadaan barang dan jasa untuk menghindari kesalahan-kesalahan teknis maupun substansi yang sering terjadi,” tambahnya.

Adapun narasumber yang dihadirkan pada pelatihan ini antara lain, Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA, M.Mgt.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.; Edi Usman, S.T., M.T., AU(MP&TBG); GCMS.

Pada penghujung kegiatan, para peserta akan diuji kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia. Kemudian peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP).

Salah satu peserta Ariana S.H saat diwawancarai oleh tim Media Justitia menyebutkan bahwa pemateri yang dihadirkan sangat menguasai materi yang disampaikan.

“Untuk penyelenggaraan secara keseluruhan menurut saya sudah cukup bagus pematerinya juga sangat menguasai materi yang disampaikan terutama saya cepat menemukan hal-hal baru terkait dengan dunia pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan selanjutnya, Silakan menghubungi:

+62 811-1021-126 (Syifa)
+62 811-1811-492 (Ghifari).

Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi: Menggali Lebih Dalam Aspek Hukum Perlindungan Risiko



Penyusunan Legal Opinion atas sengketa Asuransi.

“Dengan menggabungkan pembekalan materi yang bersifat teoritis dan praktis, harapannya akan tercetak para konsultan hukum asuransi kompeten yang profesional dan mampu untuk menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat,” tambahnya.

Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini antara lain, Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA, M.Mgt.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Kornelis Simanjuntak, S.H., M.H.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CGD, CMLC, CTLC, C.Med.; Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M.; Hamonangan Buddhawisnu Harahap, S.H., M.H.

MediaJustitia.com: Demi mendalami pemahaman hukum asuransi Justitia Training Center bersama dengan Perkumpulan Ahli Profesional Hukum Indonesia (PAPHI) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi Angkatan III pada tanggal 12 – 15 Juni 2024.

perlindungan terhadap risiko yang bisa terjadi, salah satunya yaitu Fraud.

“Di dalam perjanjian asuransi, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang sifatnya timbal balik dan setara. Fraud sebagai tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain, dapat dilakukan oleh pihak penanggung, tertanggung, ataupun pihak lain yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Untuk itu penting bagi kita mengantisipasi terjadinya fraud dengan memahami aspek-aspek dalam asuransi, serta risiko yang mungkin muncul dengan pemahaman bahasa hukum dalam penyelesaian sengketa di dunia asuransi,” jelasnya.

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting itu diikuti sebanyak 23 peserta dari berbagai kalangan baik instansi maupun individu.

Dengan seiring perkembangan zaman serta dinamika hukum yang progresif, Justitia Training Center terus berupaya untuk mengembangkan cakupan pendidikannya agar mampu mencetak “aktor-aktor” yang dapat mendukung dan melaksanakan amanat dari hukum itu sendiri.

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CGD, CTLC, CMLC, C.Med. selaku Presiden Direktur Justitia

Setelah mendapat bekal materi oleh para narasumber yang qualified, para peserta akan mengikuti uji sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia sebelum dinyatakan kompeten. LSP Hukum Indonesia sendiri merupakan salah satu dari sekitar 1.800 LSP di Indonesia yang telah memperoleh SK Pelaksanaan Asesmen Jarak Jauh (AJJ), sehingga para peserta tetap bisa melakukan asesmen dimanapun.

- Garis besar materi yang dibahas selama pelatihan berlangsung antara lain,
1. Pengantar Hukum Asuransi
 2. Manajemen dan Mitigasi Risiko Perusahaan Asuransi
 3. Implementasi Good Corporate Governance dalam Sektor Asuransi
 4. Audit Internal Perusahaan Asuransi
 5. Perjanjian Asuransi
 6. Aspek Hukum dalam Proses Klaim Asuransi
 7. Aspek Hukum dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Asuransi
 8. Kepailitan dan PKPU di Sektor Asuransi
 9. Strategi Penyelesaian Sengketa Asuransi
 10. Teknik Penyusunan Legal Opinion atas Sengketa Asuransi

Salah satu peserta Alham Satria Sakti Husni, S.H., C.L.A., CRA saat diwawancarai oleh tim Media Justitia mengatakan bahwa mengikuti pelatihan ini memang karena sesuai dengan bidangnya dan juga sudah beserta uji sertifikasinya.

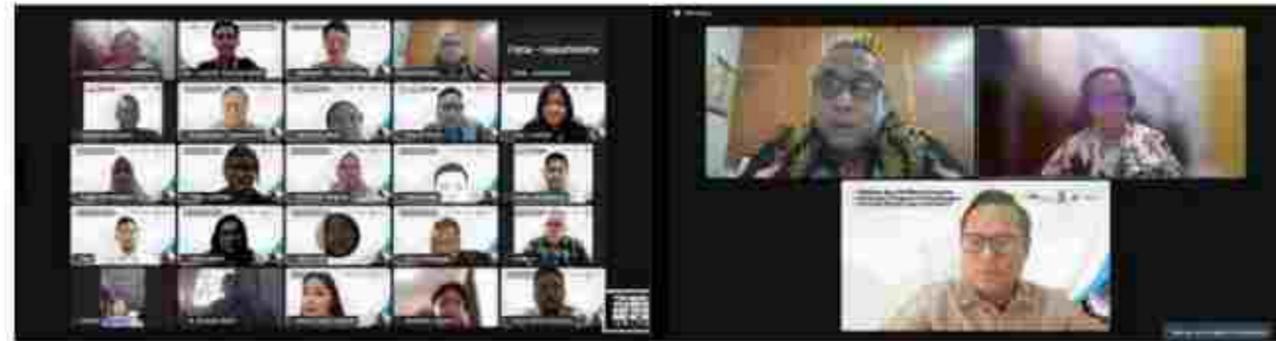
“Awalnya dapat info dari teman pernah ikut juga di Justitia, dan ternyata cocok sesuai dengan bidang saya juga, dan di Justitia ini juga sudah berikut uji sertifikasinya, jadinya ya saya tertarik untuk ikut pelatihan di Justitia,” katanya.

Untuk info Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi Angkatan selanjutnya dapat menghubungi:

+62 811-1021-524 (Putri)

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Justitia Training Center Berkolaborasi dengan Hukumonline bersama PERKHAPPI Cetak Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Profesional



MediaJustitia.com: Bersama Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI), Justitia Training Center berkolaborasi dengan Hukumonline selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan pada 11 - 15 Juni 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan selama lima hari tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, yang diikuti sebanyak 28 peserta dari berbagai kalangan baik instansi maupun individu. Kegiatan dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pelatihan selama 4 hari, dan Uji Kompetensi di hari terakhir.

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku ketua umum DPN PERKHAPPI dalam sambutannya menyampaikan bahwa life cycle yang terjadi saat ini selalu berbenturan antara masyarakat dengan pemerintah.

“Itu adalah life cycle yang terjadi saat ini selalu berbenturan antara masyarakat sebagai wilayah yang akan dijadikan tempat untuk produksi tambang dan juga dengan pemerintah daerah setempat yang menjadi suatu penguasa di wilayah itu dan begitu juga dengan pemerintah sebagai legalator di pusat dan berbenturan juga kita dengan para penegak hukum,” imbuhnya.

Amrie Hakim selaku Chief Media and Engagement Officer Hukumonline dalam sambutannya juga memberi harapan untuk para peserta mampu berkontribusi juga terhadap trend regulatory compliance dari perusahaan khususnya pertambangan di Indonesia.

“Dalam pelatihan selama beberapa hari kedepan para peserta akan mempelajari berbagai materi dan para praktisi, akademisi yang sangat berpengalaman di bidang pertambangan. Mulai dari pembahasan fundamental tentang pengaturan hukum pertambangan dalam sistem hukum di Indonesia, kemudian juga risiko hukum dan usaha bisnis pertambangan, teknik pendampingan klien dalam

penyelesaian sengketa, baik di dalam atau diluar pengadilan, serta juga peran dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam permasalahan hukumnya,” ujarnya.

Para narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan ini antara lain, Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgt.; Dr. Ir. Arief Heru Kuncoro, M.T.; Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.; Dr. Raden Sukhyar.; Dr. Ida Sumarsih, S.H., M.Kn.; Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H.; Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med.; Bisman Bhaktiar, S.H., M.M., M.M.; Abdul Haris Muhammad Rum, S.H., LL.M.; Aryangga Pradana Febrianto, S.H.

Adapun materi yang akan dibawakan oleh para pemateri dalam pelatihan ini antara lain:

1. Hukum Pertambangan dalam Sistem Tata Hukum Nasional
2. Teknik Menjalani Komunikasi yang Efektif
3. Pengusahaan, Perizinan, dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Kajian Lingkungan dan Wilayah Pertambangan
5. Usaha Jasa Pertambangan
6. Legal Due Diligence (LDD) di Sektor Pertambangan
7. Reklamasi Pasca Tambang
8. Kaidah Teknis Praktek Pertambangan yang Baik (Good Mining Services)
9. Teknik Perancangan Kontrak Pertambangan
10. Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Sengketa Perusahaan Tambang
11. Teknik dan Strategi Pendamping Terhadap Upaya Hukum Melalui Pengadilan (Litigasi) dan diluar Pengadilan (Non-Litigasi)
12. Teknik Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan
13. Risiko Hukum dan Usaha Bisnis Pertambangan

Juni
27 Juni 2024

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Juli
1 Juli 2024

DPP AAI Gandeng Justitia untuk In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Mediator

Pada hari terakhir kegiatan, para peserta melakukan Uji Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia. Kemudian peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP).

Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. salah satu peserta yang berprofesi sebagai Dosen Hukum Pertambangan dan Hukum Energi Program S2 Universitas Brawijaya saat diwawancara oleh tim Media Justitia menjelaskan latar belakangnya mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan.

“Yang melatarbelakangi saya untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya di bidang hukum pertambangan, dan pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan saya untuk meningkatkan skill terutama dalam penanganan kasus-kasus pertambangan,” jelasnya

Indah juga memberikan kesan dan pesan selama berlangsungnya kegiatan ini

“Kesan dan pesan saya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini sangatlah baik dan memberikan manfaat terutama pada peningkatan pemahaman saya akan hukum pertambangan”

Untuk info Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Angkatan selanjutnya dapat menghubungi:

0811 1021 127 (Eldi)
0811 1492 669 (Friza)

MediaJustitia.com: Justitia Training Center kembali dipercaya Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI) dalam In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Mediator bagi anggotanya. Ini adalah kali kedua AAI mempercayakan Pelatihan kepada Justitia, sebelumnya AAI juga mempercayakan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Mediator kepada Justitia Training Center.

Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 24 - 28 Juni 2024 ini diikuti sebanyak 21 peserta anggota AAI dan pelatihan ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting.

Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med. (Presiden Direktur Justitia Training Center) dalam pembukaannya menyampaikan bahwa Justitia merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

“Sejatinya, sejak tahun 2018, Justitia merupakan salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal tersebut dibuktikan dengan terjalinya afiliasi dengan berbagai lembaga nasional, maupun internasional seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Asian International Arbitration Centre (AIAC), Rajah Tann Singapore Law Firm, dan National

University of Singapore dalam hal pengembangan kompetensi di bidang arbitrase dan mediasi,” ujarnya.

Hadir juga Ketua DPC AAI Jakarta Barat Susy Tan, S.H., M.H. yang dalam sambutannya memberikan harapan kedepannya dari kerjasama yang sudah terjalin antara DPP AAI dengan Justitia Training Center.

“Kerjasamanya pasti kedepannya itu kita akan terus melakukan kerjasama di bidang-bidang yang lain, bidang-bidang pendidikan dan pelatihan lain. Intinya kalau dari AAI adalah kita ingin memajukan semua anggota, memberikan kesempatan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada semua anggota AAI untuk memperoleh pendidikan atau pelatihan yang bermanfaat,” imbuhnya.

Justitia Training Center merupakan lembaga pelatihan dan pendidikan hukum pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada skema mediator, dan kegiatan ini telah dirancang agar memenuhi standar kompetensi Mediator yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Adapun narasumber yang dihadirkan pada pelatihan ini merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya, diantaranya, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr.

Faisal Santiago S.H., M.M.; Dr. H. Edi Hudiata, L.c., M.H.; Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CGD., CTLC., CMLC., C.Med.; Dhea Yulia Maharani S.H., M.M.; Susy Tan S.H., M.H.; Ismu Bahaiduri, S.H., M.H.; Semmy Arter Mantouw, S.H., M.M., M.H.

Pada kesempatan ini juga Justitia memfasilitasi kurikulum berkompeten dengan garis besar materi sebagai berikut:

1. Orientasi Pelatihan Sertifikasi Mediator
2. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016
3. Administrasi Mediasi di Pengadilan & Restorative Justice
4. Tahapan Proses Mediasi dan Kaukus
5. Keahlian Negosiasi dalam Mediasi
6. Reframing
7. Presentasi Diri Mediator
8. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Mediator
9. Merencanakan dan Merancang Proses Mediasi
10. Memfasilitasi Para Pihak
11. Mengakhiri Proses Mediasi secara Efektif dan Efisien dan Menyusun Nota Kesepakatan
12. Teknik Analisa Konflik

Setelah 4 hari pelatihan, di hari terakhir para peserta akan mengikuti Uji Sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah terlisensi oleh BNSP.

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Juli
1 Juli 2024

Atasi Kompleksitas Permasalahan Kontrak Konstruksi, PT PGAS Solution gandeng Justitia Training Center Gelar Pelatihan Ahli Kontrak Kerja Konstruksi

Mediajustitia.com – Indonesia sering menghadapi berbagai permasalahan dalam kontrak kerja konstruksi, seperti kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum kontrak, penyusunan dokumen kontrak yang kurang tepat, dan strategi negosiasi yang tidak efektif. Permasalahan ini seringkali mengakibatkan perselisihan dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, serta berpotensi menunda penyelesaian proyek konstruksi.

PT PGAS Solution (PGAS Solution) memandang bahwa peningkatan kompetensi dalam memahami dan mengelola kontrak kerja konstruksi adalah kunci untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan efisiensi proyek. Dengan merespon permasalahan tersebut, PT PGAS Solution bekerja sama dengan Justitia Training Center menyelenggarakan In House Training Ahli Kontrak Kerja Konstruksi untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil agar lebih kompeten dalam pengelolaan kontrak kerja konstruksi yang kompleks.

PT PGAS Solution (PGAS Solution) didedikasikan untuk fokus pada teknis dan operasional aspek di bidang gas. Perusahaan ini berawal dari divisi teknis PGN, yang berhasil menyelesaikan jaringan transmisi dan distribusi gas di Indonesia. Proyek pemasangan pipa Sumatera Selatan-Jawa Barat. Proyek skala nasional ini adalah inspirasi di balik pembentukan PGAS Solution.



Pelatihan ini berlangsung dari Senin, 1 Juli s.d Rabu, 3 Juli 2024 di Kantor PT. Perusahaan Gas Negara, Jakarta Barat.

Pelatihan ini diikuti oleh 10 peserta dan menghadirkan narasumber ternama dalam bidang hukum dan kontrak konstruksi, yaitu:

– Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

– Antonius Sudarto Pudjowasito, S.H., M.H.

– Edl Usman, M.T., AU (MP & TBG), CPE., CCMS.



Pada saat pembukaan pelatihan ini, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dewan Pembina Justitia Training Center dan juga narasumber pada pelatihan ini menyampaikan pentingnya untuk memahami hukum dan kontrak konstruksi.

“...Nah ini penting sekali Bapak Ibu sekalian karena kalau misalnya tidak hati-hati, kalau dari pengalaman saya membantu PGN dalam perkara-perkara arbitrase di luar negeri itu karena kelemahan dari kita-kita jualan. Kelemahan karena kita selalu iya-ya saja. Apalagi kalau misalnya kontrak itu dalam bahasa Inggris. Dan kita tidak mencermati. Nah ini yang jadi permasalahan. Dan perusahaan rugi jutaan USD. Ini kita gak bicara soal ribuan dolar tapi sudah sampai jutaan USD. Menurut saya dalam hati sekarang saya pikir sayang. Ini semua tentu karena tidak hati-hatinya kita di dalam memahami hal kontrak. Di dalam membuat kontrak. Terutama kontrak konstruksi...” Ungkapnya.

Prof. Hikmahanto juga menyampaikan harapan kepada para peserta pelatihan untuk dapat memperoleh manfaat di kemudian hari dengan mengikuti pelatihan ini.

“...Oleh karena itu hari ini kita akan mengikuti pelatihan ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dan kemudian bisa menjaga perusahaan. Menjaga agar kerugian yang besar sekali itu bisa dicekikan resiko tersebut.”

Pelatihan ini mencakup berbagai materi penting, antara lain:

1. Pengantar Hukum Kontrak
2. Overview Kontrak Kerja Konstruksi
3. Tinjauan dan Aspek Hukum Kontrak
4. Persyaratan dan Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun
5. Pengendalian Kontrak Kerja Konstruksi
6. Strategi Pengadaan Kontrak Kerja Konstruksi
7. Teknik Penyusunan Dokumen Kontrak Konstruksi
8. Teknik membuat Kajian Dokumen Kontrak Konstruksi
9. Engineering Procurement Construction (EPC) Contract
10. Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi
11. Strategi Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi
12. Manajemen Risiko Proyek
13. Evaluasi Kegagalan Bangunan dari Aspek Kontraktual dan Komersial
14. Teknik Menyusun Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi
15. Simulasi dan Pembahasan Penyusunan Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi

Melalui pelatihan ini, PT PGAS Solution berharap para peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam praktek kerja sehari-hari, sehingga dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan efisiensi dalam proyek konstruksi.



Baca berita lainnya di <http://www.mediajustitia.com/berita/>

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia, PTPN Gandeng Justitia Training Center Gelar Pelatihan dan Sertifikasi

Juli
4 Juli 2024



Demi meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia berkompeten, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) bekerja sama dengan Justitia Training Center menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan ke 23.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dimulai dari hari Rabu, 3 Juli 2024 s.d. Jumat, 5 Juli 2024 yang mana pada hari terakhir kegiatan ini nantinya para peserta akan diuji kompetensinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah memperoleh lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kegiatan dilaksanakan di Hotel Aryaduta Medan dan dihadiri oleh 15 peserta dari berbagai unit PT. Perkebunan Nusantara.



Mewakili Presiden Direktur Justitia Training Center, Bapak Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, Ibu Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H. dalam pembukaannya menga-

presiasi inisiasi kegiatan ini oleh PTPN dalam mempersiapkan SDM-nya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan pada bidang tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi adanya inisiasi kegiatan ini oleh PTPN karena memang kita sadari bersama bahwa masalah terkait dengan ketenagakerjaan terutama pada hubungan industrial itu sangat lumrah terjadi pada perusahaan. Tentu saja perusahaan dalam hal ini harus mempersiapkan SDM-nya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan pada bidang praktisi hukum perusahaan dan juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial," ujarnya.

Dhea juga menjelaskan terkait sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat tersebut tidak hanya diakui di Indonesia saja, tetapi juga diakui hingga level Asia.

"Sertifikasi yang dilakukan ini juga merupakan sertifikasi yang diakui oleh negara melalui BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), yang mana sertifikat kegiatannya nanti tidak hanya berlaku pada lingkup Indonesia saja, tapi juga pada sektor Asia" ungkapnya.

Chairur Rizal, S.P., QIA., selaku Kepala Bagian SDM dan Sistem Manajemen PT Perkebunan



Nusantara IV Regional 1 juga mengungkapkan harapannya dalam pembukaan kegiatan ini. Ia berharap agar peserta pelatihan bisa mengikuti dengan baik dan serius, agar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi perusahaan.

"Besarnya harapan kami dengan adanya pelatihan ini sekaligus sertifikasi, Bapak-Ibu bisa mengikuti dengan baik, dengan serius. Agar bisa bermanfaat bagi individu dan juga bagi perusahaan. Pada saatnya nanti permasalahan-permasalahan hukum apakah itu permasalahan tanah? Seperti yang sering-sering kita hadapi saat ini permasalahan tanah garapan dan lain sebagainya. Karena apa? Memang manusia Indonesia ini sekarang rasa memilikinya cukup tinggi. Diharapkan untuk lebih membanggerti dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut ya," jelasnya.

Diketahui, kegiatan ini tentunya menghadirkan narasumber yang memang ahli di bidangnya, di antaranya adalah Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional FH Universitas Indonesia/Pembina Justitia Training Center), Drs. Jack Alenzo, M.M., M.H. (Konsultan dan Trainer Pengembangan SDM/Profesional Coach ASCTH ICF), dan Andriansyah Tiawarman K. S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC.

sebagai narasumber yang membawakan berbagai materi penting seperti:

1. Pengantar Hukum Perusahaan
2. Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perusahaan
3. Aksi Korporasi Perusahaan dan Akibat Hukumnya
4. Penyelesaian Sengketa Perusahaan
5. Aspek Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hukum Internasional
6. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan dan Overview UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan
7. Pandangan Umum dalam Praktek tentang Perbandingan UU 13/2003 ke UU 11/2020
8. Konsep HR dalam Perusahaan
9. Kontrak dan Perikatan dan Aspek Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
10. Potensi Dispute dan Usaha Preventifnya: Best Practice Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial
11. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
12. Mekanisme Pengupahan dan Jaminan Sosial
13. Tahapan dan Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
14. Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan dan Ketenagakerjaan
15. Teknik Penyusunan Perjanjian Bersama

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

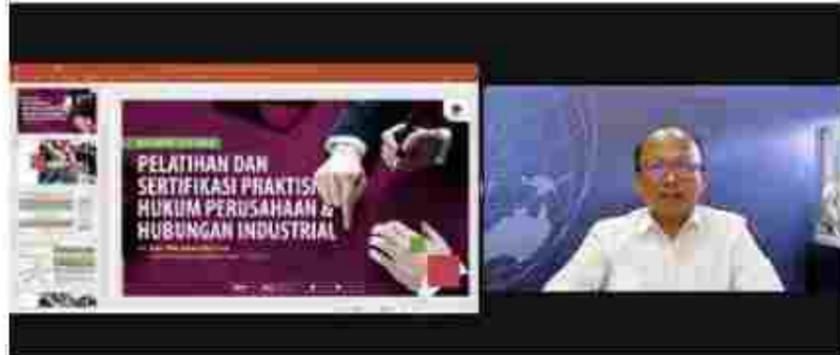
Juli
18 Juli 2024

Prof. Drs. Anwar Sanusi: Pentingnya Pendidikan Hukum Perusahaan dalam Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXIV yang diselenggarakan oleh Justitia Training Center dan PPPHI

Mediajustitia.com: Justitia Training Center bersama Perkumpulan Profesi Praktisi Hubungan Industrial (PPPHI) kembali menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXIV. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, 17 s.d. 20 Juli 2024.

Kegiatan yang disambut dengan antusias peserta ini dilaksanakan secara daring melalui platform zoom meeting. Adapun peserta pada kegiatan ini berjumlah 28 peserta yang berasal dari berbagai instansi maupun perorangan. Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med. (Presiden Direktur Justitia Training Center) dalam pembukaannya menjelaskan bahwa aspek hukum perusahaan dan hubungan industrial membutuhkan perhatian lebih, karena sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

"Kita ketahui bersama, Bapak-Ibu sekalian, bahwa hingga saat ini, aspek hukum perusahaan dan hubungan industrial membutuhkan perhatian lebih, karena sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Permasalahan atau sengketa pada hukum perusahaan dan hubungan industrial umumnya timbul akibat ketidaksesuaian antara kebijakan perusahaan dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga berimbas pada pelanggaran hak atau perbedaan



pendapat antara perusahaan, karyawan, serikat pekerja, serta pihak terkait lainnya." ungkapnya.

Andriansyah juga menambahkan pentingnya mengikuti pelatihan ini karena akan mengupas tuntas aspek-aspek hukum dalam perusahaan dan ketenagakerjaan.

"Melalui pelatihan praktisi hukum perusahaan dan hubungan industrial ini, aspek-aspek ketenagakerjaan akan di-kupas secara tuntas, sehingga Bapak-Ibu nantinya akan dibekali dengan pengetahuan praktis akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan korelasinya dengan masalah ketenagakerjaan yang timbul." ujarnya

Di pembukaan pelatihan ini juga dihadiri oleh Prof. Drs. Anwar Sanusi, MPA., Ph.D. (Sekretaris Jenderal untuk Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker RI) sebagai keynote speaker. Dalam pembukaannya, Prof.

Drs. Anwar Sanusi menyoro-oti kebijakan yang tidak selalu relevan dengan persoalan yang

dihadapi, terutama dalam konteks relasi eksternal dan hukum perusahaan serta hubungan industrial.

"Kami ingin menyoro-oti bahwa kebijakan tidak selalu relevan atau berkorelasi dengan persoalan yang dihadapi, terutama dalam konteks relasi eksternal dan hukum perusahaan serta hubungan industrial. Berdasarkan data ketenagakerjaan Indonesia dari 2009 hingga 2023, terlihat bahwa angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan SMP ke bawah menurun, menunjukkan progres positif. Sementara itu, angkatan kerja dengan pendidikan SMA meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan diploma dan universitas.

Selain itu, terjadi perubahan dari tahun 2009 di mana angkatan kerja di perkotaan kini lebih besar dibandingkan di pedesaan, kemungkinan karena mereka dengan pendidikan lebih tinggi cerung memilih bekerja di kota." kata Prof. Drs. Anwar Sanusi.



Lalu, diakhiri dengan dibukanya Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXIV oleh Prof. Drs. Anwar Sanusi.

"Dan yang terakhir adalah kita mendorong sumber daya manusia hubungan industrial. Saya rasa yang ini, yang hari ini Bapak-Ibu sekalian saya menyambut dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh apa namanya Justitia Asia Training Center untuk melakukan pelatihan terutama kepada para ahli untuk menyambut hubungan industrial. Dan mudah-mudahan tentunya acara ini menghasilkan bermanfaat dan tadi menghasilkan tenaga-tenaga yang berkompeten yang memang nanti akan menjadi pilar utama untuk kita menegakkan hubungan industrial yang lebih baik di masa-masa yang akan datang." tutupnya.

Adapun narasumber yang di-hadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.Mgt.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I.; Prof. Dr. M Hadi Subhan, S.H., M.H., CN.; Prof. Dr.

Ariawan Gunadi S.H., M.H.; Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.; Drs. Jack Alenzo, M.M., M.H.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med.

Pada kesempatan ini, Justitia memfasilitasi kurikulum ber-kompeten dengan garis besar materi sebagai berikut.

1. Pengantar Hukum Perusahaan dan Overview UU Cipta Kerja Klaster UU Perseroan Terbatas
2. Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility dalam Perusahaan
3. Aksi Korporasi Perusahaan dan Akibat Hukumnya bagi Tenaga Kerja
4. Konsep HR dalam Perusahaan
5. Pandangan Umum dalam Praktek Tentang Perbandingan UU 13/2003, UU 11/2020 ke UU 06/2023
6. Kontrak dan Perikatan dan Aspek Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
8. Mekanisme Pengupahan dan Jaminan Sosial
9. Aspek Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hukum Internasional
10. Potensi Dispute dan Usaha

11. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
12. Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial
13. Pemutusan Hubungan Kerja
14. Akibat Kepailitan bagi Perusahaan dan Ketenagakerjaan
15. Teknik Menyusun Perjanjian Bersama

Setelah mendapat pembekalan materi selama 3 hari, para peserta akan mengikuti uji sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Profesi Sertifikasi (BNSP).

Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial selanjutnya, hubungi:

0811 9942 112 (Hadi)
0811 1254 0305 (Rahmah)

UPCOMING EVENT AGUSTUS 2024

Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan XLVI

(Certified Contract Drafter)

📅 07 s.d. 10 Agustus 2024 ⌚ 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XXX

(Certified Tax Legal Consultant)

📅 21 s.d. 25 Agustus 2024 ⌚ 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Angkatan XXXIII

(Certified Mining Legal Consultant)

📅 28 Agustus s.d. 01 September 2024 ⌚ 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan XXXIII

(Certified Professional Legal Analyst)

📅 28 Agustus s.d. 01 September 2024 ⌚ 08.30 s.d. 16.30 WIB



Adagium Hukum

ID PERFECTUM EST QUAD EX OMNIBUS SUIS PARTIBUS CONSTANT

Something is declared perfect when every part of it is complete
Sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya lengkap

PRESUMPITO IUSTAE CAUSA

A government decision is considered valid until a judge's decision has binding legal force stating otherwise.

Suatu keputusan pemerintahan dianggap absah sampai ada putusan hakim berkekuatan hukum mengikat yang menyatakan sebaliknya.

QUIQUID EST IN TERRITORIO, ETIAM EST DE TERRITORIO

The principle of international law which states that what is within the boundaries of a country's territory is subject to the law of that country.

Asas dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam batas-batas wilayah negara tunduk kepada hukum negara itu.

NEMO JUDEX IN CAUSA SUA

The judge may not regulate or judge himself.

Hakim tidak boleh mengatur atau mengadili dirinya sendiri.

INIQUUM EST ALIQUEM REI SUI ESSE JUDICEM

It is not fair for a person to be judged in his own case.

Tidak adil bagi seseorang untuk diadili pada perkaranya sendiri.

AKPI Soroti Skema Restrukturisasi Utang di Luar Pengadilan

Mediajustitia.com: Mengangkat topik menarik, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menggelar Seminar Internasional bertajuk "Out-of-court Restructuring in Emerging Economies: Best Practices and Major Challenges" dengan dihadiri oleh 50 orang peserta.



Bertempat di Hotel Ayana Midplaza, AKPI menghadirkan Steven Kargman (President Kargman Associates/ International Restructuring Advisor) dan William E. Daniel (Founder and Member of the Professional Standards Board of AKPI).



Secara umum, Steven membahas mengenai Debt Restructuring: An Overview and 'Best Practices'; Restructuring in the 'Shadow of the Insolvency Law'; Legal Underpinnings of Debt Restructuring; Challenges of Debt Restructuring in the Emerging Markets; Hallmarks of an Effective Restructuring Process

Steven menjelaskan bahwasanya terdapat 2 (dua) acuan utama dalam best practice out-of-court, yakni London Approach dan INSOL Statement of Principles for a Global Approach to MultiCreditor Workouts"

Dalam wawancara terpisah bersama tim Media Justitia, sebagaimana Steven merasa mendapatkan banyak ilmu, Steven berharap para peserta juga merasa sesi pemaparan menarik untuk diikuti dan membuka wawasan baru pada perspektif Internasional.

"Katanya, out-of-court debt restructuring di sini tidak sepopuler penyelesaian utang di Pengadilan. Namun berkaca dari negara-negara berkembang lainnya, out-of-court bisa menjadi sangat penting dan bermanfaat mengingat bisa memangkas waktu dan biaya, serta sifatnya yang lebih fleksibel," jelas Steven.

Sementara itu, William E. Daniel membahas mengenai Out-of-court Debt Restructuring in Indonesia. Salah satu yang ia garisbawahi dalam paparannya adalah mengenai skema penyelesaian di luar Pengadilan.

"Jangan sampai kita menggunakan skema yang tidak dapat diimplementasikan. Perlu didiskusikan terlebih dahulu apakah out-of-court perlu dibuatkan aturan secara rigid atau dibuat semacam Kode Etik yang bisa diakses secara bebas saja sudah cukup. Saya rasa sudah waktunya Indonesia untuk membuat skemanya sendiri," pungkas William.



Sebelumnya, Indonesia pernah mengadopsi skema out-of-court restructuring yang dapat ditemukan pada Jakarta Initiative Task Force, INDRA, BPPN/IBRA, restrukturisasi utang bank, dan restrukturisasi semasa COVID.

Dengan dimoderatori oleh Dimas Indartono (Head of International Affairs of AKPI), sesi pemaparan ditutup dengan sesi diskusi yang disambut antusias oleh para

peserta, tanpa terkecuali Muhammad Ardiningrat Hidayat, Amd.Im, SH, MPA selaku Kurator Keperdataan Ahli Madya Ditjen AHU Kementerian sekaligus Peserta kegiatan. Adapun pemilihan topik dilakukan karena restrukturisasi di luar pengadilan dirasa bisa diimplementasikan di Indonesia.

"Kita butuh insight dari kancah internasional, karena out-of-court ini belum terlalu familiar di Indonesia. Harapannya selain mendapat wawasan, out-of-court bisa menjadi suatu konsep yang disepakati bersama," ujar Dimas dalam wawancara bersama tim Media Justitia.

Diketahui, saat ini AKPI tengah aktif di dunia internasional. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal AKPI, Nien Raffles Siregar, S.H., M.H.

"AKPI memang tengah berusaha mendapatkan exposure di dunia internasional yang lebih besar. Belakangan kami aktif bergaul dengan profesi-profesi kurator dan pengurus dari yurisdiksi lain agar dapat membangun network dan belajar apa saja perkembangan di negara lain yang sekiranya bisa diterapkan di Indonesia," ujar Raffles.

Lebih lanjut, Nien Raffles menyampaikan bahwa AKPI telah menjadi anggota asosiasi INSOL (International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals) dan aktif dalam menjadi pembicara di forum restrukturisasi di Asia. Raffles turut menyampaikan bahwasanya aka nada MoU yang ditindaklanjuti di bulan November mendatang,



Keberhasilan Akreditasi Unggul Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur: Bukti Dedikasi dan Profesionalisme



Mediajustitia.com: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur kini telah mendapatkan akreditasi Unggul dengan nilai 367. Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Faisal Santiago, menyatakan sangat puas dengan hasil tersebut. Pencapaian ini melengkapi keberhasilan Program Doktor Ilmu Hukum yang sebelumnya telah terakreditasi Unggul dengan nilai 375.

"Kualitas menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan yang optimal dan total akan menghasilkan prestasi tertinggi yang tidak bisa dipungkiri," ujarnya pada Selasa (2/7/2024).

Faisal memberikan apresiasi atas kinerja Kaprodi MIH Dr. Azis Budianto dan Dr. Ahmad Redi dalam pencapaian ini.

"Peran Ketua Tim Akreditasi, Prof. Ade Saptomo, sangat luar biasa dalam penyusunan berkas akreditasi ini sehingga akreditasi Unggul dapat tercapai," tambahnya.

Hasil ini menjadikan Universitas Borobudur sebagai PTS pertama di Jakarta atau di Wilayah

LLDikti 3 yang terakreditasi UNGGUL untuk Program Studi S2 dan S3 Ilmu Hukum.

"Ini merupakan pencapaian yang luar biasa," kata Rektor Universitas Borobudur, Prof. Bambang Bernanthos.

Universitas Borobudur, yang terletak di Jl. Raya Malahayati (Kalimalang) No. 1, Jakarta Timur, memiliki lokasi yang sangat strategis sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk menimba ilmu di program pascasarjana. Dosen tetap dan tenaga kependidikan yang berdedikasi serta profesional dalam melayani mahasiswa dan proses belajar mengajar, tersedianya sarana dan prasarana modern, ruang baca berbasis digital, serta sertifikasi ISO 9001:2015 menjadikan kualitas tata kelola selalu terjaga.

"Program Pascasarjana Universitas Borobudur selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan guna memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara melalui alumni yang berkualitas untuk menjadikan Indonesia lebih baik," pungkas Faisal.

Pengukuhan Guru Besar Dr. Firmanto Laksana: Menyelaraskan Pendidikan dengan Pengembangan Hukum di Indonesia

Mediajustitia.com: Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., Direktur Operasional Senayan Avenue by Ottolima, telah resmi diangkat sebagai Guru Besar oleh Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) pada Jumat, 5 Juli 2024, di Auditorium Unissula Semarang. Penunjukan ini menandai prestasi istimewa dalam karir akademis dan profesional Dr. Firmanto, yang juga mencerminkan dedikasi serta sumbangsuhnya dalam berbagai bidang, terutama hukum dan industri golf.

Sebagai menantu dari Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang juga terlibat dalam tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo dan Presiden RI, Dr. Firmanto memiliki latar belakang yang kuat di bidang hukum. Gelar Guru Besar ini tidak hanya sebagai simbol pengakuan atas dedikasinya di dunia akademik, tetapi juga memperkuat perannya dalam mendukung sistem hukum di Indonesia. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, Dr. Firmanto bertekad untuk memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan hukum di tanah air. Dalam perannya sebagai anggota tim kuasa hukum Presiden Jokowi dan calon presiden saat ini, Dr. Firmanto berperan penting dalam kasus-kasus hukum yang strate-

gis untuk kepentingan negara. Ia berkomitmen untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penerapan hukum, serta memberikan nasihat hukum yang strategis dan berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat.

Selain kontribusinya di bidang hukum, Dr. Firmanto memiliki visi yang kuat untuk mengembangkan industri golf di Indonesia. Ia yakin bahwa pengetahuan akademisnya akan membantu dalam mencapai tujuan ini. Sebagai Direktur Operasional Senayan Avenue by Ottolima, Dr. Firmanto telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung perkembangan industri golf di Indonesia.

Dr. Firmanto aktif terlibat dalam berbagai inisiatif untuk memajukan industri golf nasional, termasuk pengembangan program Indonesia Junior Golf yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat muda dalam olahraga golf. Melalui inisiatif ini, Dr. Firmanto berharap dapat menciptakan generasi baru pegolf profesional yang dapat bersaing secara internasional.

Selain itu, Dr. Firmanto baru-baru ini menyelenggarakan turnamen golf bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indo-

nesia. Turnamen ini tidak hanya sebagai kompetisi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap olahraga golf. Kolaborasinya dengan Lemhanas menunjukkan upayanya dalam memperkuat hubungan antara olahraga, pendidikan, dan ketahanan nasional.

Dalam pidatonya setelah pengangkatannya, Dr. Firmanto menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, kolega, dan semua yang telah mendukungnya. Ia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan industri golf dan hukum di Indonesia.

"Gelar Guru Besar ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia. Saya berharap, dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi di masa depan," ujar Dr. Firmanto.

Dengan prestasi ini, Dr. Firmanto Laksana berharap dapat menginspirasi generasi muda dan para profesional di Indonesia untuk terus belajar dan berkontribusi dalam bidang yang mereka geluti.



Kolaborasi Justitia Training Center dan IPRI Law Institute: Meningkatkan Mutu Pendidikan Hukum di Indonesia

Justitia Training Center, dengan slogannya "Crystal of Law Education", kembali membuktikan tekadnya untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut bukan hanya sebuah slogan belaka. Pada Kamis, 11 Juli 2024 Justitia menyelenggarakan agenda penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan IPRI Law Institute dalam rangka kolaborasi Program Pelatihan dan Kegiatan Uji Sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Agenda ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif IPRI, Latifah, S.H., M.H., C.L.A., C.T.T., C.MK., C.NS., Direktur Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan, Utomo Bimantoro, S.H., C.PS., dan Kepala Biro Humas, Naufal Arie Taufik Nur Rahman, S.H.



Andriansyah Tiawarman K, selaku Direktur Justitia Training Center, menyambut baik ajakan kolaborasi ini. "Kami menyambut baik setiap kerja sama dan kolab-

orasi yang datang. Saya berprinsip kalau ada yang ingin berkolaborasi kenapa tidak? Sudah sangat banyak kolaborasi yang telah kami lakukan dengan lembaga-lembaga lain. Alhamdulillah Justitia sejauh ini sudah punya 24 skema, Justitia Training Center sangat terbuka untuk kerjasama-kerjasama lainnya karena menurut saya, semua orang sama-sama pernah berjuang dari kecil hingga besar", ungkap Andriansyah dalam sambutannya. Hal tersebut yang mendorong Andriansyah untuk membuka selebar-lebarinya kerjasama dengan pihak-pihak yang ingin berkolaborasi.



Agenda kerja sama ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat Indonesia. Kolabora-

si ini dirancang untuk menghadirkan pendekatan inovatif dalam pelatihan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga praktis. Dengan demikian, diharapkan bahwa program ini dapat menjadi wadah yang efektif dalam mencerdaskan dan mempersiapkan generasi muda serta para profesional hukum untuk menghadapi tantangan kompleks dalam sistem hukum saat ini.



Sesi penandatanganan MoU oleh Andriansyah dari Justitia Training Center dan Latifah dari IPRI Law Institute menandai komitmen kuat dari kedua institusi untuk menjalankan program ini dengan penuh integritas dan dedikasi. Langkah ini tidak hanya mencerminkan semangat kerja sama yang erat antara sektor pendidikan dan praktisi hukum, tetapi juga menegaskan komitmen mereka dalam meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan hukum di Indonesia.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan akan tercipta dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan ilmu hukum di tanah air, menghasilkan lulusan dan profesional hukum yang tidak hanya kompeten tetapi juga berintegritas tinggi dalam melayani masyarakat dan negara.

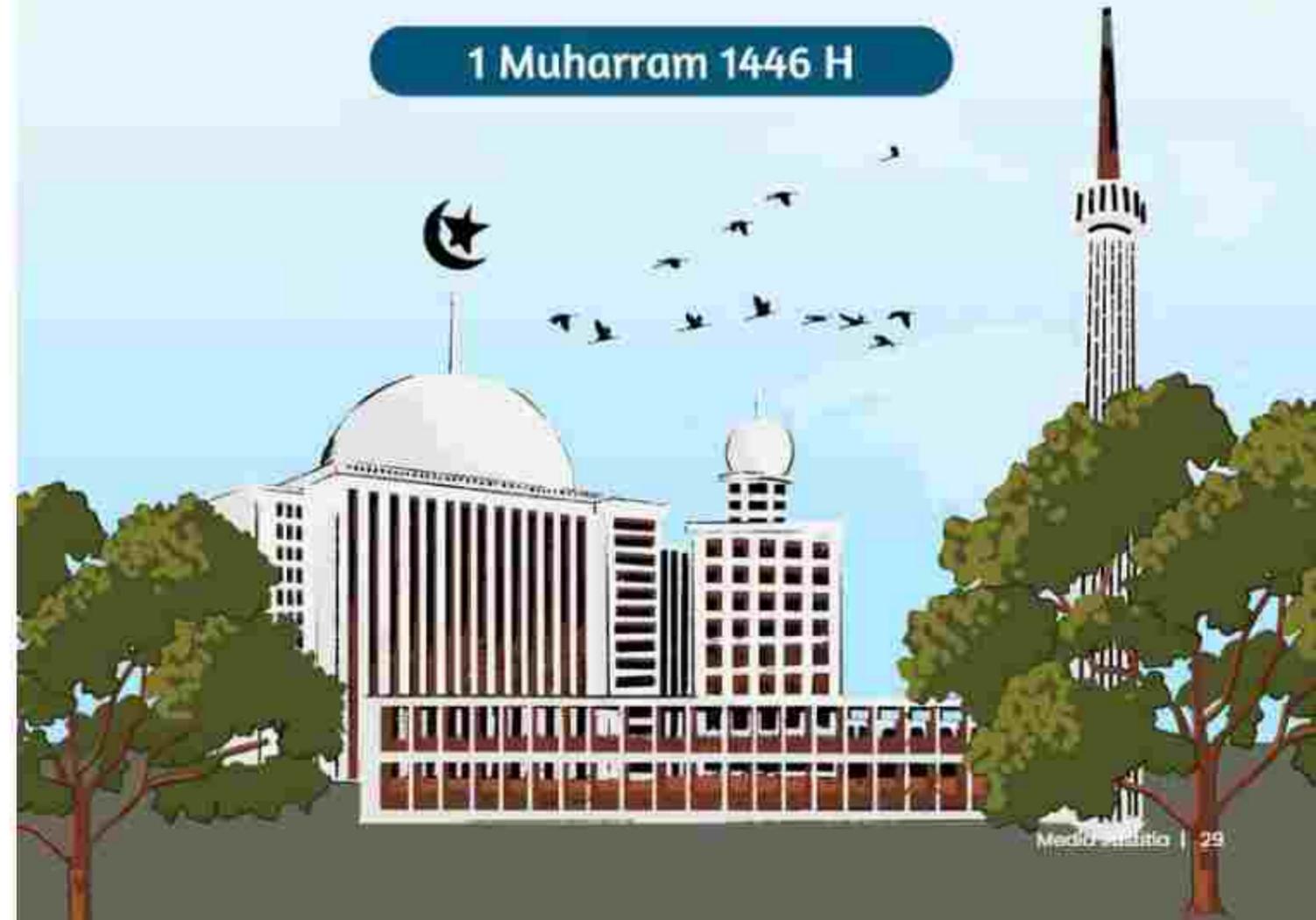
"Terima kasih banyak kepada Justitia Training Center telah bersedia menerima kolaborasi ini. Kolaborasi ini adalah langkah awal bagi kita untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan. Hal ini karena kita memiliki kegiatan yang sama dan juga visi misi yang sama, sehingga tidak ada kendala bagi kami untuk membangun kerja sama ini. Justitia telah menjadi pusat pelatihan hukum yang cukup besar, sehingga kami perlu belajar banyak dengan Justitia.", ujar Latifah mengakhiri sesi penandatanganan MoU.



Selamat Merayakan

Tabung Baru Islam

1 Muharram 1446 H



Kolaborasi PERADI dan IJRS: Pelatihan Undang-Undang Kekerasan Seksual untuk Advokat



Mediajustitia.com – Pada hari Kamis, 18 Juli 2024, PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) bekerjasama dengan IJRS (Indonesia Judicial Research Society) menyelenggarakan pelatihan bagi advokat yang membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kegiatan ini berlangsung dalam format hybrid, dengan sesi offline di PERADI Tower lantai 3, Jakarta Timur, serta sesi online melalui platform Zoom Meeting.

Acara dibuka dengan sambutan dari tiga tokoh penting yang memberikan pandangan mereka mengenai pentingnya pelatihan ini:

- Marsha Maharani S.H., Program Manager for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion, menekankan pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam penegakan hukum, serta perlunya advokat yang paham dan peka terhadap isu-isu kekerasan seksual.

- R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H., Ketua Harian/Wakil Ketua Umum DPN PERADI, menyoroti peran penting advokat dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan bagaimana undang-undang yang baru ini dapat menjadi alat yang efektif dalam penanganan kasus-kasus tersebut.
- Ir. Priyadi Santosa, M.Si., Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, membahas tentang langkah-langkah pemerintah dalam melindungi hak perempuan dan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual.



dalam penanganan kasus kekerasan seksual, memberikan wawasan hukum yang komprehensif, serta memperkuat kapasitas advokat dalam memberikan bantuan hukum yang efektif dan berkeadilan. Diharapkan, dengan pelatihan ini, advokat dapat lebih siap dan peka dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, serta mampu memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban.

Acara ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para peserta pelatihan dapat berinteraksi langsung dengan narasumber. Sesi ini menjadi kesempatan bagi para advokat untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan undang-undang tersebut dalam kasus nyata, berbagi pengalaman, serta mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam praktik sehari-hari.

Pelatihan ditutup dengan pesan-pesan penutup dari penyelenggara dan narasumber, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar advokat, penegak hukum, dan berbagai lembaga dalam upaya memberantas kekerasan seksual. Peserta pelatihan diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam praktik mereka, serta terus meningkatkan kompetensi dan kesadaran mengenai isu-isu kekerasan seksual.

Dengan pelatihan ini, PERADI dan IJRS berharap dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua, terutama bagi korban kekerasan seksual.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain:

1. Kombes. Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.Hi., Pemeriksa Inafis Kepolisian Madya TK. III Pusinafis Bareskrim Polri, memberikan paparan mengenai prosedur pemeriksaan forensik dalam kasus kekerasan seksual, serta tantangan dan solusi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.
2. Andreas N. Marbun, S.H., LL.M, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia/ Peneliti IJRS, membahas implikasi hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta bagaimana advokat dapat memanfaatkannya untuk membela kepentingan korban kekerasan seksual secara efektif.
3. Noridha Weningsari, M.Psi., Psikolog, Ketua Bidang I Pengembangan Profesi & Standarisasi Praktik Psikolog Forensik, menyampaikan materi tentang dampak psikologis kekerasan seksual terhadap korban dan pentingnya pendekatan yang berempati dalam mendampingi korban selama proses hukum.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman advokat mengenai peraturan terbaru

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

“Algojo Para Koruptor”

Pria yang dikenal sebagai hakim agung ini memulai karirnya sebagai dosen pada tahun 1976 di Universitas Islam Indonesia.

Ia juga aktif berkegiatan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta hingga pada tahun 1989 ia menduduki jabatan sebagai Direktur LBH.

Foto: <https://berita.baca.tn.id/>

Ia bekerja pada Human Right Watch divisi Asia di New York selama 2 tahun sekaligus ia menampuh pelatihan untuk pengacara mengenai HAM.

Selepas menempuh pendidikannya di luar negeri, ia kembali ke Ibu pertiwi dan mendirikan kantor hukum bernama Artidjo Alkostar and Associates.

Tidak bertahan lama, ia pun ditunjuk sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung oleh Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.

Lika-liku perjalanan sebagai Hakim Agung tidak ditempuhnya dengan jalan yang mulus. Ia dikenal sebagai sosok yang idealis, tegas, dan berani membawanya sebagai hakim yang ditakuti oleh para koruptor bahkan muncul sebutan sebagai

“Algojo para koruptor”

dimana ia kerap kali memberikan hukuman yang berat kepada para terdakwa dan tak pandang bulu, seperti saat ia mengadili perkara kasus korupsi Yayasan dengan terdakwa mantan presiden Soeharto.

Setelah purnatugas dari profesinya sebagai hakim agung pada 21 Mei 2018, Artidjo ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi anggota Dewan Pengawas KPK pada tahun 2019.

Pada 28 Februari 2021 kemarin beliau dipanggil kehadiran tuhan Yang Maha Esa.

Riwayat Pendidikan

- SMA Asem Bagus Situbondo
- Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta
- Master Of Laws (LL.M), North Western University, Chicago
- Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang



Foto: Antara

PRODUCTION TEAM

**Arif
Budiman**

Head of
Production



**Alfira Dyah
Kusuma W**

Graphic
Designer



**Handoko
Sigit**

IT Developer
& Editor



**Fahmi Nur
Islami**

Social Media
Officer



**Della
Savelya**

Legal
Researcher



CALL FOR ARTICLE BATCH XXII

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch XXII" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. Margin (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



Segera kirimkan tulisanmu sebelum **20 Agustus 2024** melalui email ke:

 **medjustitia@gmail.com**

Contact Us For More!



Arif Budiman
+62 811-8201-492



Alfira Dyah
+62 811-1492-283

MEDIA JUSTITIA

VOL.16

One Stop Legal Information



Kantor Pusat Media Justitia
Perkantoran Golden Centrum
Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia

Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112

www.mediajustitia.com